

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adanya otonomi daerah membuat suatu daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sehingga kesejahteraan dan tujuan pemerintahan bisa tercapai. Demi tercapainya pemerintahan yang dapat mengatur dan mengurus urusannya pemerintah harus melaksanakan kinerja pemerintah daerah itu sendiri dengan baik agar menghasilkan hasil yang maksimal sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat umum.

Otonomi daerah merupakan usaha pemanfaatan daerah dalam mengambil keputusan daerah yang berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki sesuai kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut, seiring dengan berjalannya otonomi daerah maka didirikanlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang merupakan bagian dari pembangunan daerah. Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan harapan kita bersama.

Pemerintah mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan yang dapat memberikan kesejahteraan kepada negara dan

masyarakat, oleh karena itu dengan adanya pengawasan internal terhadap pengukuran kinerja yang sistematis dapat menghasilkan kinerja yang baik, dalam pengukuran pencapaian kinerja Pemerintah Daerah maka hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah akan semakin baik dengan tingkat keefektivitas dan keefisienan pengguna dalam pencapaian kinerja apabila pengawasannya dilakukan secara maksimal.

Hasil evaluasi kinerja juga tidak terlepas dari peran pemeriksaan, menurut BPK perlu adanya pemeriksaan kinerja yang terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Undang-undang Nomor 17 tahun 2003). Instrumen yang digunakan sesuai dengan SKPN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) sebanyak dua indikator yaitu: kesesuaian standar pemeriksaan, pengendalian intern manajemen.

Kualitas evaluasi kinerja perlu adanya sistem pengendalian intern. Sistem Pengendalian Intern yang dimaksud dalam evaluasi kinerja adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan sistem pengendalian intern harus dan wajib diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menurut pasal 1 Peraturan

Pemerintah No 60 Tahun 2008. Laporan kinerja merupakan salah satu tugas pokok instansi serta sebagai motor penggerak SKPD dalam mengawal kesuksesan pelaksanaan birokrasi sebagai upaya untuk menciptakan budaya kerja yang baik, dan memberikan pelayanan publik yang prima, bersih dan akuntabel.

Laporan evaluasi kinerja juga tidak luput dari akuntabilitas, dimana akuntabilitas merupakan kunci dari hasil laporan evaluasi kinerja, karena tujuan evaluasi adalah untuk meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Akuntabilitas juga sebagai pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan *good governance*.

Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target yang diderivasi dari tujuan organisasi, untuk mewujudkan kinerja pemerintah yang mencapai target dan memuaskan. Pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan salah satunya yaitu menyempurnakan sistem administrasi Negara secara menyeluruh dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundang-undangan daerah.

Terdapat beberapa kasus dalam kinerja instansi pemerintah yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu adanya kelemahan pada pengendalian intern dan

ketidapatuhan terhadap ketentuan undang-undang, selain itu ketidakefisienan dan ketidakefektifan kinerja instansi (BPK, 2015).

Informasi yang dihasilkan berupa laporan kinerja instansi yang dibutuhkan, karena dengan adanya laporan kinerja ini pemerintah dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik. Hasil Evaluasi LAKIP yang dilakukan Kementerian PANRB pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan 2,95 poin dari hasil rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/kota dibanding tahun 2015, walau mengalami peningkatan namun rata-rata nilai pada kabupaten/kota masih dibawah 50% yang mempunyai arti masih dibawah kategori C, selain itu sebanyak 425 kabupaten dan kota masih mendapat nilai dibawah B (www.menpan.go.id).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Pradanadi Skasesa Drinanda Ibrahim (2015) dengan perbedaan variabel, dalam penelitian Pradanadi variabel nya yaitu Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Pengawasan Internal dan Akuntabilitas, pada penelitian ini variabel nya yaitu Pengawasan Internal, Pemeriksaan, Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas, alasan penambahan variabel yaitu adanya keterkaitan antar variabel, pengawasan internal bisa terjadi jika ada pemeriksaan yang efektif dan efisien, akuntabilitas akan maksimal jika didalamnya terdapat sistem pengendalian intern. Kedua perbedaan pada sampel, sampel dalam penelitian ini yaitu PNS Pemerintah Kota Semarang. Ketiga perbedaan

pada tahun penelitian, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Maka peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul *“Pengaruh Pengawasan Internal, Pemeriksaan, Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Semarang”*. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadikan evaluasi bagi pemerintah kota Semarang sehingga kinerja Pemerintah Daerah Kota Semarang dapat memenuhi fungsinya dalam memberikan kinerja yang lebih baik kepada masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai kinerja pemerintah daerah di wilayah Instansi Pemerintah khususnya Kabupaten/Kota perlu dilakukan karena adanya isu dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara yang membahas mengenai hasil evaluasi kinerja Pemerintah Daerah yang masih kurang, maka penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan peningkatan kinerja di Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pengawasan internal, pemeriksaan, sistem pengendalian intern dan akuntabilitas di dalam kinerja, khususnya Kota Semarang untuk menghasilkan sasaran pencapaian yang tepat. Berdasarkan pada latar belakang yang telah

diuraikan sebelumnya maka terbentuk beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain adalah :

1. Apakah pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Semarang?
2. Apakah pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Semarang?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Semarang?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris:

1. Pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Semarang.
2. Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Semarang.
3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Semarang.

4. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas penelitian sebelumnya dengan pengujian pengaruh pengawasan internal, pemeriksaan, sistem pengendalian intern dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun akademik lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu untuk perkembangan dan kemajuan pengetahuan dalam dunia pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Semarang , dalam hal ini Pemerintah Daerah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kota Semarang.

